

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN
PRAKTIK BAIK DEMOKRASI DI KALANGAN PELAJAR**

**Latifah Hannum Gultom¹, Frans Togu Sihombing², Eka Mei Riska³,
Jamaludin⁴, Sri Yunita⁵**

latifahhh29@gmail.com¹, franstogusihombing@gmail.com², meiriska.26eka@gmail.com³,
jamaludin@unimed.ac.id⁴, sriyunitasugiharto@gmail.com⁵

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Demokrasi pada dasarnya harus didukung dengan praktik partisipasi politik warga negara baik dalam memengaruhi pengambilan, dan pelaksanaan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Pendidikan politik membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana pemerintahan dan sistem politik bekerja. Partisipasi dalam pemilihan umum merupakan sebuah hak dan kewajiban masyarakat dalam sistem demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Implementasi Pendidikan Politik di SMA Methodist 7 Medan yang dimana mempengaruhi pemahaman dan partisipasi siswa dalam praktik demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan sebagian didapat dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tahap awal dalam pembentukan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi adalah melalui pendidikan politik di tingkat Sekolah Menengah Atas. Pendidikan politik tentunya sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan siswa dalam hal politik, pemerintahan, dan isu-isu sosial. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa praktik pendidikan politik sangat penting diterapkan. pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang sadar politik dan mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Salah satu strategi efektif dalam pendidikan politik adalah menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif.

Kata Kunci: pendidikan, politik, demokrasi, pelajar.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik adalah salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang partisipatif dan terinformasi secara politik. Namun, di berbagai negara, terutama di Indonesia, seringkali terjadi kendala yang menghambat efektivitas penyampaian pendidikan politik kepada masyarakat. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan akses dan distribusi pendidikan politik di seluruh wilayah. Terdapat kesenjangan akses terhadap pendidikan politik di daerah-daerah terpencil atau pedesaan, di mana sumber daya dan infrastruktur pendidikan seringkali kurang memadai. Selain itu, tingginya tingkat urbanisasi juga mengakibatkan masyarakat perkotaan yang lebih terpapar informasi politik daripada masyarakat di pedesaan. Selain kendala geografis, masalah sosial dan budaya juga mempengaruhi efektivitas pendidikan politik. Beberapa masyarakat mungkin menghadapi kendala berupa kurangnya minat, kesadaran politik yang rendah, atau kepercayaan yang salah terhadap proses politik. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya motivasi untuk memperdalam pengetahuan politik.

Selanjutnya, pendidikan politik seringkali tidak diintegrasikan dengan baik dalam sistem pendidikan formal. Kurikulum yang ketinggalan zaman atau tidak memadai untuk mengajarkan pengetahuan politik yang relevan dan kontekstual, serta kurangnya pelatihan guru yang memadai dalam bidang ini, turut mempengaruhi kurangnya efektivitas pendidikan politik. Kondisi ini semakin diperparah oleh penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di era digital. Masyarakat saat ini sering terpapar pada informasi yang bersifat sensational atau tidak akurat, yang dapat mempengaruhi persepsi politik dan membingungkan pemahaman tentang sistem politik.

Partisipasi dalam pemilihan umum merupakan sebuah hak dan kewajiban masyarakat dalam sistem demokrasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terlihat peningkatan fenomena ketidakpartisipasian dalam bentuk Golput (Golongan Putih) di berbagai pemilihan umum di Indonesia. Faktor utama penyebab golput adalah tingginya tingkat apatis masyarakat terhadap politik. Apatis ini mungkin timbul dari rasa kecewa terhadap kinerja pemerintah, korupsi, atau kurangnya kepercayaan pada para calon pemimpin. Masyarakat dapat merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan nyata dalam sistem politik yang dinilai buruk. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pendidikan politik dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik juga berperan besar dalam fenomena golput. Beberapa masyarakat mungkin tidak memahami konsekuensi langsung dari ketidakhadiran mereka dalam pemilihan umum, atau bahkan tidak tahu cara memilih dengan benar. Perasaan tidak terwakili dan diabaikan oleh elite politik juga dapat mempengaruhi sikap apatis masyarakat. Rasa bahwa kepentingan masyarakat tidak diutamakan oleh para calon dan partai politik dapat mengurangi motivasi untuk ikut serta dalam pemilihan.

Pola perubahan sosial juga memengaruhi tingkat partisipasi politik. Urbanisasi dan modernisasi bisa mengubah prioritas masyarakat, terkadang mengarah pada kurangnya minat terhadap urusan politik karena lebih fokus pada kehidupan ekonomi atau teknologi. Fenomena media sosial dan informasi yang cepat juga memengaruhi partisipasi politik. Terlalu banyak informasi, termasuk yang tidak valid, dapat membingungkan masyarakat dan membuat mereka enggan untuk terlibat dalam proses politik.

Di masa sekarang ini, menjelang pemilihan umum maraknya politik uang menjadi fenomena yang merajalela dalam proses politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini merusak integritas demokrasi dengan mengubah prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya

berlandaskan pada suara dan kepentingan masyarakat menjadi transaksi ekonomi yang tidak sehat. Politik uang dapat mencakup pembelian suara, penyalahgunaan dana kampanye, dan pemberian imbalan finansial untuk mempengaruhi pemilih. Praktik politik uang menimbulkan ketimpangan dalam kompetisi politik. Calon atau partai dengan akses finansial lebih besar memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan pesaingnya yang kurang mampu secara finansial. Hal ini mengubah pemilihan menjadi ajang yang lebih dipengaruhi oleh kekayaan daripada kualifikasi atau visi politik. Selain itu, politik uang juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam pemerintahan setelah pemilihan. Calon yang terpilih dengan bantuan dana besar cenderung lebih rentan terhadap kepentingan kelompok atau individu yang membiayainya, mengakibatkan kebijakan yang mungkin tidak selalu menguntungkan masyarakat umum.

Selain dari sisi kandidat, pemilih juga terpengaruh oleh politik uang. Pemilih dapat menerima imbalan finansial atau barang untuk memberikan suara kepada calon tertentu, mengorbankan kebebasan berpikir dan memilih sesuai dengan keyakinan politik mereka. Pengendalian dan pencegahan politik uang merupakan tantangan besar dalam menjaga integritas demokrasi. Regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif politik uang terhadap proses politik dan kualitas demokrasi.

Krisis kepercayaan politik seringkali diakibatkan oleh peran besar kelompok kepentingan atau kekuatan lobi dalam proses politik. Kelompok kepentingan, yang dapat berasal dari sektor bisnis, industri, atau organisasi non-pemerintah, memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan publik. Salah satu penyebab krisis kepercayaan adalah adanya intervensi yang tidak transparan dan tidak akuntabel dari kelompok kepentingan di dalam proses politik. Mereka dapat memanipulasi kebijakan dan legislasi untuk mendukung agenda mereka sendiri, seringkali bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum.

Selain itu, kelompok kepentingan dengan sumber daya finansial yang besar dapat mempengaruhi proses pemilihan umum dengan memberikan dana kampanye yang besar kepada calon atau partai politik tertentu. Hal ini dapat mengubah dinamika kompetisi politik dan memberikan keunggulan yang tidak adil kepada kandidat yang mendapat dukungan finansial tersebut. Kendala lainnya adalah revolving door phenomenon, di mana anggota kelompok kepentingan dapat berpindah ke posisi pemerintah dan sebaliknya. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang dapat merongrong kepercayaan masyarakat pada integritas dan independensi lembaga publik. Krisis kepercayaan politik akibat campur tangan kelompok kepentingan juga mempengaruhi etika dan akuntabilitas para pemimpin. Masyarakat sering kali merasa bahwa kebijakan yang diambil lebih menguntungkan kelompok kepentingan daripada kepentingan umum, memperkuat persepsi korupsi dan tidak adil dalam politik. Pengawasan yang lemah terhadap aktivitas kelompok kepentingan, kurangnya transparansi, serta perlunya regulasi dan kode etik yang kuat untuk membatasi intervensi kelompok kepentingan dalam proses politik menjadi fokus untuk mengatasi krisis kepercayaan politik yang diakibatkan oleh faktor ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, di mana informasi diperoleh melalui berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian, yaitu SMA Swasta

Methodist 7. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian tanpa mengambil kesimpulan yang lebih luas. Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi panduan wawancara, lembar observasi, dan lembar dokumentasi. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, dan data sekunder, yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, buku, jurnal, dan sumber lainnya.

Menurut Hasan (2002:58) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan penggalian informasi dari berbagai sumber, dengan melakukan pembacaan, analisis, korelasi, dan pencatatan materi yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Politik di SMA Methodist 7 yang Mempengaruhi Pemahaman dan Partisipasi Siswa dalam Praktik Demokrasi

Pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan masyarakat demokratis. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan sistem demokrasi, pendidikan politik menjadi hal yang krusial. Salah satu tahap awal dalam pembentukan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi adalah melalui pendidikan politik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendidikan politik tentunya sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan siswa dalam hal politik, pemerintahan, dan isu-isu sosial. Melalui pendidikan politik, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berpartisipasi dalam diskusi yang sehat, serta memahami prinsip-prinsip demokrasi. Implementasi pendidikan politik di SMA memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan partisipasi siswa dalam praktik demokrasi. Penerapan partisipasi politik siswa di SMA Methodist 7 sudah di realisasikan dengan beberapa pemilihan yang dibuat di sekolah.

Salah satu penerapan praktik tersebut diwujudkan melalui pemilihan Ketua Osis, Wakil Ketua Osis, Sekretaris dan Bendahara. Dalam pemilihan di SMA Methodist 7 mekanisme pemilihannya yaitu suara terbanyak yaitu ditetapkan menjadi Ketua Osis, Suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Wakil Ketua Osis, Suara terbanyak ketiga ditetapkan sebagai Sekretaris dan Suara terbanyak keempat sebagai Bendahara. Tetapi dalam hal ini tetap menggunakan beberapa syarat lain misalnya jika ada calon yang tidak bersedia dengan kemenangan hasil suara sesuai minatnya akan ditinjau ulang dan dilakukan pemilihan ulang terhadap bidang yang bersangkutan. Misalnya pemenang suara ketiga terbanyak tidak bersedia menjadi sekretaris maka akan dilakukan pemilihan kembali. Sistem seperti ini sudah diterapkan dari beberapa tahun terakhir dengan berbagai pertimbangan yang telah disepakati pihak sekolah. Pemilihan ini dilakukan di lapangan sekolah dengan menggunakan system pemilihan pada umumnya sehingga membuat siswa secara langsung dan real menggunakan hak suaranya melalui pemilihan ketua osis. Pemilihan tersebut tentunya diikuti oleh seluruh siswa di SMA

Methodist 7. Pemilihan Osis tahun 2023/2024 dilakukan pada bulan September kemarin. Proses pemilihannya yaitu bergiliran setiap kelas antri dipanggil untuk menentukan pilihannya.

Sebelum proses pemilihan bulan September kemarin dari wawancara yang kami lakukan juga kepada guru di SMA Methodist 7 Medan, mereka mengadakan sosialisasi pemilihan ataupun penerapan Pendidikan politik secara serentak yang diadakan di Aula sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar mengetahui apa sebenarnya Pendidikan politik melalui demokrasi dan bagaimana penerapannya. Antusias siswa di SMA tersebut sangat luar biasa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Sesi pertanyaan juga menjadi salah satu moment paling mengesankan karena ada sangat banyak siswa yang bertanya aktif terkait dengan demokrasi itu. Mulai dari secara teoritis dan implementasinya dijelaskan saat kegiatan itu. Sekolah juga mengundang salah satu narasumber untuk mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Pihak sekolah juga menyampaikan harapannya melalui kegiatan tersebut agar mengajak siswa untuk turut aktif nantinya dalam lingkungan sosialnya dalam partisipasi politik bukan hanya sekedar tau tetapi memahami serta melakukan realitas implementasinya dengan baik dan benar.

Dapat kita lihat Implementasi pendidikan politik yang baik di SMA dapat memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman siswa tentang sistem politik dan prinsip-prinsip demokrasi. Siswa akan lebih mampu memahami peran dan fungsi pemerintah, hak-hak warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Mereka juga akan mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu politik dan sosial yang relevan. Selain dengan mendukung pengetahuannya juga mendukung keterampilannya dalam melaksanakan haknya untuk partisipasi politik.

Peran Pendidikan Politik dalam Membentuk Sikap Demokratis dan Kesadaran Politik Siswa

Kesadaran politik mengacu pada pemahaman individu tentang isu-isu politik, struktur politik, dan tindakan politik yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan politik membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pemerintahan dan sistem politik bekerja. Ini melibatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, proses pemilihan umum, serta isu-isu politik dan sosial yang memengaruhi masyarakat. Sikap demokratis mencakup keyakinan dalam prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Melalui pendidikan politik, siswa diajarkan untuk menghargai dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka belajar bahwa partisipasi politik adalah cara efektif untuk mengubah masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Tentunya peran Pendidikan Politik di SMA Methodist 7 Medan merupakan hal yang sangat penting. Berbagai penerapan Pendidikan politik selalu rajin dilakukan sekolah untuk mendukung siswa turut serta berperan aktif dalam mewujudkan sikap demokratis yang baik sebagai warga negara Indonesia. Siswa SMA saat ini yang merupakan generasi Z menjadi perpanjangan tangan di masa yang akan datang. Generasi inilah yang menjadi penerus bangsa dalam menjalankan berbagai roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Dalam persiapan tersebut tentunya dibutuhkan dorongan yang signifikan harus dilaksanakan sebaik mungkin untuk terus menggali minat siswa dalam mengasah dirinya. Saat ini teknologi yang begitu pesat memaksa setiap orang untuk bisa dan paham dalam penggunaannya. Tanpa pemahaman yang

memadai teknologi, seseorang bisa tergerus oleh zaman, tetapi sebaliknya jika seseorang paham tanpa menyaring tentunya juga dapat tergerus zaman karena informasi di internet sudah oversharing, yang membuat seseorang yang membacanya ada yang percaya tanpa disaring.

Salah satu tantangan utama dalam pendidikan politik di SMA Methodist 7 Medan adalah keterbatasan kurikulum. Seringkali, materi pendidikan politik dalam kurikulum sekolah tidak cukup mendalam atau relevan. Ini dapat mengakibatkan siswa hanya memahami konsep dasar tentang sistem politik dan demokrasi, sementara isu-isu politik kontemporer yang kompleks terabaikan. Penting untuk memperbarui kurikulum secara berkala dan memastikan materi pendidikan politik mencakup isu-isu terkini dan penting. Karena di SMA Methodist 7 Medan masih menggunakan Kurikulum 2013. Sementara beberapa sekolah di Medan sudah banyak yang menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Tetapi pada tahun depan rencananya akan serentak memberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar untuk mendukung keberlangsungan belajar yang lebih efektif dan baik kedepannya. Dalam mendukung keberhasilan Kurikulum Merdeka Belajar Peran Guru menjadi peran yang sangat penting. Namun, seringkali guru-guru kurang mendapatkan pelatihan yang cukup dalam bidang pendidikan politik. Diperlukan upaya untuk memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada guru agar mereka dapat memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada siswa. Maka dari itu keberhasilan guru dalam mengajar menjadi tolak ukur dalam penerapan Pendidikan politik. Meskipun pendidikan politik memainkan peran penting dalam membentuk sikap demokratis, tantangan-tantangan yang dihadapi tidak boleh diabaikan. Dengan komitmen untuk memperbarui kurikulum, meningkatkan akses dan sumber daya, serta memberikan pelatihan kepada guru, pendidikan politik dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk pemahaman dan sikap demokratis siswa. Ini adalah investasi penting untuk mendukung demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Strategi Efektif dalam Mengintegrasikan Pendidikan Politik untuk mempromosikan Praktik Demokrasi yang lebih baik

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memerlukan partisipasi aktif dan pemahaman warga negara. Oleh karena itu, pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang sadar politik dan mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Salah satu strategi efektif dalam pendidikan politik adalah menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Ini mencakup diskusi kelas, simulasi pemilihan umum, permainan peran, proyek-proyek kolaboratif, dan debat. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar, memahami konsep politik dengan lebih baik, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Penting untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan politik mencakup materi yang relevan dan berimbang. Ini termasuk pemahaman tentang sistem politik, sejarah politik, hak dan kewajiban warga negara, serta isu-isu sosial dan politik terkini. Materi kurikulum harus dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi dan memungkinkan siswa untuk memahami isu-isu politik yang kompleks. Dalam era informasi digital, literasi media dan keterampilan kritis sangat penting. Siswa harus diajarkan cara mengevaluasi sumber informasi, mengenali berita palsu (hoaks), dan memahami dampak media sosial dalam politik. Dengan literasi media yang baik, siswa dapat menjadi konsumen informasi yang cerdas dan mampu berpartisipasi dalam diskusi politik yang berbasis fakta. Mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial dan politik di sekolah atau

komunitas mereka adalah salah satu cara efektif untuk mengintegrasikan pendidikan politik. Misalnya, siswa dapat mengorganisir kampanye sosial, menjadi pengamat pemilu, atau berpartisipasi dalam kelompok diskusi politik. Ini memberikan kesempatan praktis untuk mengaplikasikan pengetahuan politik mereka dalam tindakan nyata. Mengundang ahli dan pemimpin politik lokal atau nasional untuk berbicara di sekolah dapat memberikan wawasan langsung kepada siswa tentang praktik politik yang sedang berlangsung. Pertemuan dengan praktisi politik membantu siswa untuk lebih memahami bagaimana proses politik bekerja di dunia nyata dan menginspirasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

Strategi-strategi efektif dalam mengintegrasikan pendidikan politik adalah kunci untuk mewujudkan praktik demokrasi yang lebih baik. Dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif, materi kurikulum yang relevan, literasi media, pelibatan aktif dalam proyek-proyek politik, dan interaksi langsung dengan pemimpin politik, siswa akan lebih siap untuk menjadi warga negara yang sadar politik dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Pendidikan politik yang efektif adalah investasi penting dalam masa depan demokrasi.

KESIMPULAN

Pendidikan politik memainkan peran penting dalam membentuk sikap demokratis dan kesadaran politik siswa. Pendidikan Politik dapat membantu siswa memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, keadilan sosial, dan isu-isu global. Pendidikan politik juga tentunya dapat membantu membangun sikap demokratis siswa dan partisipasi siswa dalam organisasi. Hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dapat terjadi karena adanya faktor lingkungan sekitar yang kurang baik membawa dampak negatif bagi siswa, adanya rasa malas . Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakan pembelajaran yang menarik untuk siswa, memberikan motivasi agar mampu mengambil setiap keputusan, serta mengontrol tingkah laku siswa melalui kerjasama antara guru dan orang tua .

Implementasi Pendidikan Politik di sekolah tentunya menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan demokrasi baik. Sebagai warga negara yang baik tentunya harus memiliki peran partisipasi dalam politik. Implementasi Pendidikan Politik di sekolah dapat diwujudkan melalui Pemilihan Ketua Osis, Pemiliha dan Perangkat Kelas. Hal tersebut diwujudkan guna mencapai keberhasilan demokrasi. SMA Methodist 7 sudah menerapkan berbagai implementasi Pendidikan politik tersebut dengan berbagai pendekatan yang dilakukan. Dengan adanya hal itu membuat siswa menjadi sangat antusias dalam menyuarakan pilihannya melalui proses pemilihan tersebut. Pendidikan politik itu membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pemerintahan dan sistem politik bekerja. Ini melibatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, proses pemilihan umum, serta isu-isu politik dan sosial yang memengaruhi masyarakat.

Dalam pengimplementasian Pendidikan politik diperlukan berbagai strategi yang efektif agar siswa tertarik untuk melaksanakan perannya sebagai warga negara yang demokratis. Dengan adanya penerapan Pendidikan politik yang baik di SMA dapat menumbuhkan semangat demokratis, pengaruh positif, pemahaman akan hak dan kewajiban, dan pemahaman siswa tentang sistem politik dan prinsip-prinsip demokrasi. Siswa akan lebih mampu memahami peran dan fungsi pemerintah, hak-hak warga negara, serta pentingnya partisipasi

dalam pemilihan umum. Mereka juga akan mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu politik dan sosial yang relevan. Selain dengan mendukung pengetahuannya juga mendukung keterampilannya dalam melaksanakan haknya untuk partisipasi politik sehingga menjadi praktik demokrasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, "Idrus. 1996. Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik. Disertasi
- Kartono, Kartini. 1989. Pendidikan Politik. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Djoko Sumanto, A. H. (2021). Pendidikan Politik. Tangerang: Unpam Press.
- Hasan, Iqbal. 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta. Ghalia Indonesia

Jurnal

- Affandi, F. N. (n.d.). Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda
- Arfenti Amir, A. M. (2022). Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Berdemokrasi. Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI , 209-216
- Arlis Prayugo, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 3,(No 3), 427-442
- Farid Shalihudin, F. H. (2021). Pern Pendidikan Politik dalam Membangun Sikap Demokratis Siswa melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah di SMP Negeri 22 Semarang. Jurnal Sosiolum, Vol 3(No 1), 75-82
- Muhammad Haris Zulkarnain, A. S. (Des 2021). Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 3,(Nomor 2), 154-173.